

MAKNA DAN MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN¹

THE MEANING AND MODEL OF DEVELOPMENT COMMUNICATION

Udi Rusadi

Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan media pada Puslitbang Literasi dan Profesi
email : firusadi51@gmail.com, Jln. Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat
(Naskah diterima Maret 2014, diperiksa mitra bestari April 2014, direvisi Mei 2014,
disetujui terbit Juni 2014)

ABSTRACT

This article is a review towards the communication development theory and practices in Indonesia, to analyze on how the tendencies of the usage of the development model and how it should be. Through the literature study, it illustrates that the participatory development model apparently has not become the main strategy. The linear model through the dissemination of information and innovation diffusion is still the dominant paradigm. The usage of Communication and Information Technology for development, which focuses more on the provision of infrastructure have not yet been supported by the participatory and continuous model of empowerment model. The Communication and Information Technology has already become the social transformation paradigm which provides opportunities to increase the development capacity more rapidly and effectively. Based on the paradigm, this analysis offers a convergence of communication development model which is hoped to be able to mobilize all resources collaboratively and optimally.

Keywords : communication, development, model, technology, convergence

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan tinjauan terhadap konsep-konsep teoritik komunikasi pembangunan dan praktiknya di Indonesia, untuk menganalisis bagaimana kecenderungan model pembangunan yang digunakan dan model sebaiknya. Melalui kajian literatur, kajian ini menunjukkan bahwa model komunikasi pembangunan partisipatif tampaknya masih belum menjadi strategi utama. Model linier melalui diseminasi informasi dan difusi inovasi masih menjadi paradigma dominan. Penggunaan TIK untuk pembangunan lebih fokus pada penyediaan infrastruktur belum diikuti dengan pemberdayaan dengan model partisipatif dan berkesimbangan. Teknologi komunikasi dan informasi sudah merupakan paradigma transformasi sosial yang menyediakan peluang peningkatan kapasitas pembangunan yang lebih cepat dan berkualitas. Berbasis paradigma tersebut kajian ini menawarkan model komunikasi pembangunan konvergensi yang diharapkan bisa menggerakkan semua sumberdaya secara kolaboratif dan optimal.

Kata-kata Kunci : komunikasi, pembangunan, model, teknologi, konvergensi

PENDAHULUAN

Kosakata pembangunan di Indonesia dewasa ini kurang populer karena proses pembangunan pada Kera pemerintahan massa lalu lebih dekat dengan pembangunan fisik berupa gedung, jalan, jembatan. Selain itu pembangunan juga sering diasosiasikan dengan kosakata penggusuran karena untuk mewujudkan proyek pembangunan fisik tersebut banyak yang diawali dengan proses penggusuran lahan, rumah tinggal atau bangunan yang ada. Walaupun secara konseptual sebenarnya pembangunan memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar pembangunan fisik.

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan sosial yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Rogers, 1985), pembangunan tidak sekedar pembangunan fisik tetapi juga mencakup perubahan

¹ Tulisan ini pernah dimuat menjadi bagian dari buku *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat*, sebagai tulisan inti, terbitan kerjasama Badan Litbang SDM Kominfo dengan Penerbit Media Bangsa, tahun 2013. Pada bagian pembahasan terdapat penambahan analisis dengan memberikan tawaran konsep komunikasi pembangunan model konvergensi yang merupakan integrasi dari model komunikasi penunjang pembangunan dengan TIK untuk pembangunan.

sosial dan lingkungan (Budiman, 1995). Degradasi konsep pembangunan tersebut, diawali dengan praktek-praktek penyalahgunaan praktek proses pembangunan dimana masyarakat diminta partisipasi untuk memberikan dukungannya dalam bentuk kerelaan menyerahkan asetnya dengan ganti rugi, namun masyarakat tidak memperoleh keuntungan dari berbagai proyek tersebut dan malah tidak mengangkat kehidupan sosialnya dari proyek tersebut.

Kosakata yang kini sering banyak digunakan ialah reformasi dan perubahan, sebagai sebuah konsep yang sebenarnya memiliki pengertian yang sama dengan konsep pembangunan. Namun kosakata perubahan memberikan makna lebih konkret dan lebih retorik pada situasi masyarakat yang sudah terlalu lama memimpikan adanya perubahan dari kondisi yang dialami sekarang dengan kondisi lebih memberikan perbaikan menuju ke arah yang lebih menyejahterakan.

Konsep perubahan pun jika digunakan sebatas retorika dan apabila tidak menunjukkan adanya realitas perubahan yang konkrit maka kelak juga akan kehilangan maknanya. Dalam tulisan ini kosa kata pembangunan merupakan sebuah konsep perubahan bukan dalam konsep imaji negatif yang disebabkan kesalahan praktek proses pembangunan. Sejatinya Indonesia dewasa ini masih sedang dalam proses pembangunan dan nomenklatur tersebut juga masih digunakan dalam dokumen formal perencanaan nasional. Kalau dalam era Orde Baru dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita yang ditetapkan melalui Sidang Umum MPR, dan pelaksanaannya disebut Pembangunan Lima Tahun atau Pelita. Di era reformasi dikenal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ditetapkan oleh UU, sehingga sama-sama memiliki kekuatan hukum namun tidak sekuat dulu sebagai Ketetapan MPR.

Pandangan terhadap pembangunan telah mengalami perubahan sesuai perubahan di bidang sosial dan politik dan perkembangan teknologi di negara yang terkait. Kondisi ini akan memengaruhi model pembangunan yang digunakan dalam arti bagaimana pengelolaan pembangunan dan kearah mana pembangunan akan dicapai. Bagaimana gagasan pembangunan diterapkan akan melibatkan elemen komunikasi yaitu cara mengkomunikasikan gagasan pembangunan yang ditemukan. Dalam konteks inilah kemudian berimplikasi terhadap model dan strategi komunikasi pembangunan yang digunakan. Tulisan ini mengkaji bagaimana esensi model pembangunan yang berkembang dan implikasinya terhadap model komunikasi dan prakteknya di Indonesia. Bagaimana implikasi makna pembangunan berdasarkan implementasi model model pembangunan. Pembahasan diawali dengan penjelasan model pembangunan, implikasi pada model komunikasi pembangunan dari berbagai perspektif. Penjelasan dibatasi pada lingkup esensial, dan berdasarkan kerangka konseptual pada model model tersebut, dikemukakan beberapa kasus yang kemudian dibuat refleksinya terhadap model dan makna pembangunan dan terakhir dikemukakan model komunikasi pembangunan yang sebaiknya yang perlu didiskusikan lebih lanjut.

PEMBAHASAN

A. Model Pembangunan

Merujuk pada pandangan filosofis proses modernisasi, pembangunan diartikan sebagai proses rasionalisasi pola pikir masyarakat yang terikat pada nilai-nilai yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang, seperti menggunakan cara-cara tradisional dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat. Dalam konsep modernisme, pembangunan masyarakat diarahkan pada pengembangan rasionalisme barat sehingga modernisme dianggap sebagai westernisme, dengan demikian demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi barat yang bertumpu pada individualisme dan mengembangkan kapitalisme. Fenomena pembangunan di Indonesia cenderung pada pola-pola pembangunan yang lebih mengedepankan kepentingan individu atau kelompok dengan mengembangkan kapital individu dan kelompok.

Kritik terhadap modernisme dikemukakan oleh Habermas bahwa modernisasi merupakan proses rasionalisasi bertujuan dari suatu sub-sistem tindakan dan menutup berbagai tujuan yang berkiblat pada pengembangan rasionalisme selektif dengan mengembangkan rasionalisme komunikatif melalui tindakan komunikatif dalam ruang publik atau *public sphere* (lihat Hardiman, 2009). Artinya model pembangunan barat berakar pada filsafat rasionalitas yang dieksport ke negara berkembang.

Nilai-nilai yang dianggap sebagai penyebab terjadinya keterbelakangan antara lain dikemukakan oleh Mc CLelland (dalam Budiman, 1995) adalah rendahnya *need for achievement*,

maka untuk melakukan proses pembangunan harus dilakukan upaya dengan menyebarkan virus *need for achievement* tersebut, sehingga dengan tumbuhnya hasrat berprestasi tersebut akan menjadi sumber motivasi untuk menggerakkan pembangunan. Kritik pada model pembangunan modern tersebut digerakkan oleh pemikir Marxian (Budiman, 1995, di Amerika Latin, yang memandang bahwa keterbelakangan disebabkan bukan karena faktor internal negara yang bersangkutan, tetapi oleh faktor-faktor luar.

Dalam perspektif ini, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya keterbelakangan adalah kekuatan proses kolonisasi, penjajahan dan sebenarnya memiliki kemampuan namun peluang yang diberikan terhadap mereka serta stimulan masih terbatas. Model pembangunan ini disebut dengan model pembangunan dunia ketiga, yang memperjuangkan agar eksploitasi negara-negara maju dihentikan, dan proses pembangunan lebih banyak memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan dirinya.

Tahun 1976, Rogers (1976, 50-51) meninjau model pembangunan modernisasi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, teknologi padat modal, perencanaan terpusat dan menganggap bahwa penyebab keterbelakangan berasal dari faktor intern negara berkembang dianggap sebagai paradigma dominan dan telah berakhir dan kemudian berkembang paradigma alternatif. Paradigma alternatif tidak lagi mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi tetapi pada keseimbangan atau kesetaraan distribusi, kualitas hidup, proses pembangunan menekankan pada integrasi cara tradisional dan modern serta menekankan pada teknologi yang padat karya.

Pada paradigma alternatif ini, perencanaan lebih mengadalkan pada pengembangan diri melalui proses desentralisasi dan partisipasi masyarakat, sebagai penyebab suatu negara menjadi tidak berkembang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor dari internal tetapi juga faktor eksternal. Dengan pandangan ini, maka proses pembangunan dimulai dari sistem internal masyarakatnya, dengan cara proses pemberdayaan potensi-potensi yang ada dan ide pembangunan harus bersumber dari kebutuhan nyata masyarakatnya. Perdebatan ke dua model itu terjadi pada tahun-tahun 1990-an, dan dewasa ini masih berlangsung, penganut model pembangunan modernisasi selalu berargumentasi untuk menunjukkan kemajuan pembangunan yang dicapai dengan ukuran-ukuran makro statistik seperti angka pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan dunia ketiga lebih melihat dari faktor mikro seperti kemampuan masyarakat memperoleh kehidupan layak, kondisi kesehatan, dan pendidikan.

Model pembangunan lain yang banyak mendapat perhatian ialah pembangunan yang berlandaskan pada kesinambungan lingkungan hidup agar dalam menggunakan sumberdaya pembangunan tidak memberikan dampak negatif. Konsep ini berusaha menjawab adanya ancaman terhadap kehidupan manusia dari dinamika teknologi dan ekonomi dan peningkatan populasi penduduk serta perubahan lingkungan dan sosial (Bossel, 1999). Pembangunan berkelanjutan ialah pola penggunaan sumber daya yang memenuhi kebutuhan manusia yang tidak saja untuk masa sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Konsep tersebut digunakan guna menggambarkan kehidupan ekonomi yang berkesinambungan dengan sistem yang mendukung kondisi ekologi negara yang bersangkutan.

Masalah pembangunan tidak saja menjadi perhatian masing-masing negara-negara yang sedang membangun semata, Badan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat permasalahan mengatasi kemiskinan merupakan permasalahan global. PBB pada tahun 2010 kemudian mendeklarasikan tujuan pembangunan di era millenium yang disebut *Millennium Development Goal* atau MDGs. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kesetaraan martabat, kebebasan, standar hidup yang mendasar yang meliputi kebebasan dari kelaparan dan kekerasan, dan kemudian berusaha mendorong terciptanya solidaritas dan toleransi antar negara di dunia pada tahun 2000. Kesepakatan diadopsi oleh 189 pimpinan Negara dan ditandatangani oleh 147 negara, yaitu target-target yang harus dicapai pada tahun 2015 untuk mengentaskan kemiskinan.

Target-target tersebut dijabarkan dalam indikator-indikator yang terukur sebagai ukuran pencapaian upaya pengentasan kemiskinan di suatu Negara, yang meliputi 8 sasaran yaitu mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh

jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih (Report of The Secretary-General, 2001, United Nation, 2003). Program pembangunan masyarakat global, juga dirumuskan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin negara-negara di dunia guna membangun masyarakat Informasi tahun 2003 melahirkan deklarasi untuk membangun masyarakat informasi yang terpusat pada manusia, inklusif dan berorientasi pada pembangunan (Moejiono, 2006).

Dengan terbangunnya masyarakat informasi, maka masyarakat dapat menciptakan, mengakses, menggunakan berbagai informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan dan mendayagunakan kemampuan mereka sepenuhnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunanyang targetnya disepakati dalam *millenium goal*. Sebenarnya era informasi telah terjadi lama yaitu pada periode 30-tahun setelah meluasnya penggunaan komputer dan ekonomi pengetahuan. KTT masyarakat informasi pertama dihadiri oleh 175 negara dimana mereka mengadopsi Deklarasi mewujudkan masyarakat informasi. Deklarasi merumuskan *Road Map* (peta jalan) untuk mencapai masyarakat informasi. Salah satu Rencana Aksinya ialah menetapkan tujuan membawa 50 persen dari penduduk terhubung secara *online* dunia pada tahun 2015.

B. Model Komunikasi Pembangunan

Implikasi dari proses pembangunan sebagai modernisasi yang berusaha mengubah suatu negara atau suatu organisasi dengan sistem yang berasal dari luar maka model komunikasi yang digunakan adalah penyebaran ide baru atau *diffution of innovation* media, yang selanjutnya ditulis difusi inovasi), yaitu proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Komunikasi dalam model ini merupakan sebuah proses dimana partisipan menciptakan dan menyebarkan informasi diantara satu anggota dengan anggota lainnya dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman (Rogers, 1983; Jahi, 1987). Melalui model ini proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi ialah melalui tahapan mulai dari tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi.

Tahun 1987 atau setelah 10 tahun Rogers melakukan tinjauan dan mengkritik model pembangunan yang bertumpu pada konsep modernisasi, Jayaweera menulis artikel dan memikirkan kembali atau *rethinking* terhadap model komunikasi Pembangunan. Jayaweera melihat perkembangan teknologi komunikasi dan memiliki potensi sebagai pendukung percepatan pembangunan. Jayaweera kemudian membedakan konsep komunikasi pembangunan (*Development Communications-DC*) dengan Komunikasi Penunjang pembangunan (*Development Support Communication-DSC*). Dalam model DC pendekatan yang dilakukan merupakan model makro, merupakan proyek nasional yang diterapkan ke seluruh anggota masyarakat, sedangkan DSC pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan mikro yang berusaha menyelesaikan permasalahan masyarakat pada tingkatan komunitas sesuai dengan aspirasi komunitasnya. Secara rinci dapat dilihat dari tabel 1.

Model pembangunan yang bertumpu pada proses dari bawah (*bottom up*) yang memunculkan model komunikasi partisipatif, dalam konteks ini komunikasi dikembangkan untuk mengajak elemen masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan ini Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) memperoleh porsi utama untuk memberdayakan masyarakat.

Isu pembangunan telah bergeser menjadi isu perubahan. Pendekatan komunikasi dalam rangka menciptakan perubahan yang bertumpu teori-teori persusasi yang berbasis pada teori-teori komunikasi dan psikologi, berkolaborasi dengan teori-teori ekonomi mikro sehingga memunculkan konsep pemasaran social (*social marketing*), yaitu upaya melakukan perubahan social dengan pendekatan marketing. Pendekatan komunikasi pembangunan lebih sektoral untuk mengatasi permasalahan masyarakat di sektornya.

Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan masyarakat, dan kampanye perubahan sosial merupakan upaya yang terorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok sosial yang diarahkan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kampanye perubahan sosial merupakan upaya yang terorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok agen perubahan yang diarahkan untuk mempengaruhi kelompok lainnya dengan tujuan untuk mengubah, atau untuk mengabaikan beberapa gagasan, sikap, paraktek dan perilaku (Kotler, 1989:6).

Tabel : 1
Ciri Komunikasi Pembangunan dan
Komunikasi Penunjang Pembangunan

Komunikasi Pembangunan		Komunikasi Penunjang Pembangunan	
1	Secara umum diterapkan untuk tingkat nasional atau makro	1	Secara umum diterapkan untuk tingkat mikro
2	Bersifat fungsional, tidak terarah, samar-samar.	2	Bersifat fungsional, terarah, memperhatikan efek, berorientasi pada tujuan
3.	Tidak ada batas waktu dan melalui proses persuasif	3	Dibatasi waktu dan menggunakan teknik kampanye
4	Bergantung pada dampaknya dari karakteristik yang melekat pada teknologi	4	Berorientasi pada pesan, dan hati-hati dalam menyajikan pesan
5	Dibatasi pada media berbasis teknologi, yaitu media massa	5	Menggunakan seluruh jenis media berbasis kultur
6	Sepenuhnya “top down” dan bersifat hirarhi	6	Selalu interaktif dan pengembangan keterlibatan masyarakat (participatory)
7	Penyelenggaraan penelitian yang sangat kompleks – jumlah variable yang besar, sulit diakses dan dikendalikan, konsekuensi, penelitian yang sangat terukur.	7	Pelaksanaan penelitian mudah, variable dapat dibatasi, dikendalikan, terukur, penelitian yang tersedia volume besar
8	Kehilangan kredibilitas bertahun-tahun	8	Memperoleh kredibilitas yang besar, diterima secara luas oleh system UN dan semua agency pembangunan.

(diterjemahkan bebas tabel yang dikemukakan Jayaweera (1987))

Komunikasi pembangunan partisipatif dikembangkan di Brazilia oleh Paulo Preire seorang pendidik kelompok dewasa yang mengkampanyekan literasi di kalangan petani. Inti model ini ialah melakukan perubahan bukan pada tingkatan individu tetapi pada tingkatan struktural dan sosial. Prosesnya lebih menekankan pada proses dialogis dan bukan komunikasi yang linier (Tuftte, 2009). Lebih lanjut Tuftte menjelaskan perbandingan antara komunikasi model difusi inovasi dan model partisipatif antara lain, jika model difusi inovasi dilakukan berdasarkan perspektif permasalahan masyarakat memiliki kekurangan informasi sedangkan pada model partisipatif dilakukan karena kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan (*stake holder*) masyarakat.

Faktor budaya pada model difusi inovasi dianggap sebagai hambatan, sedangkan pada model partisipatif aspek budaya merupakan jalan hidup masyarakat. Artinya budaya memiliki cara-cara dalam memecahkan berbagai kesulitan masyarakat. Katalistor pembangunan pada model difusi ialah agen perubahan yang berada diluar sytem, sedangkan pada model partisipatif agen perubahan berada di dalam dan luar lingkungan masyarakat bekerja dalam hubungan kemitraan. Sedangkan pada model partisipatif yang menjadi katalis perubahan ialah gabungan factor luar dan dalam.

Rujukan yang ada dalam masyarakat pada model difusi bersifat pasif yang menjadi sasaran yang akan diubah. Sedangkan pada model partisipatif target aktif sebagai warganegara atau pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sasaran perubahan yang dituju pada model difusi ialah perilaku individu sedangkan dalam model partisipatif ialah perubahan perilaku individu dan sosial serta norma sosial dan kekuatan sosial. Dengan demikian hasil yang akan dicapai dalam model difusi ialah perubahan perilaku individual yang dinyatakan oleh jumlah SDM yang berubah,

sedangkan dalam model partisipatif *outcome* dinyatakan dengan artikulasi proses social dan politik dan adanya kesinambungan perubahan dan terciptanya tindakan kolektif.

Peranan teknologi dalam pembangunan telah mulai dibahas ketika Jayaweera mengkaji peranan teknologi satelit komunikasi dalam proses pembangunan, hanya saja teknologi yang dimaksud ialah teknologi dalam rangka perluasan jaringan dan jangkauan media radio dan televisi. Teknologi komunikasi dan informasi mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1990 an, dan ketika internet menjadi *platform* jaringan komunikasi melalui komputer yang hanya digunakan sebagai penunjang administrasi dan data base. Peranan meningkat setelah *platform* jaringan statis berkembang dengan munculnya teknologi mobil pada tahun 2000 an.

Oleh karena itu peranan teknologi informasi dan komunikasi menurut Duncombe (2012) terbagi dalam tiga fase (lihat tabel 2). Pertama TIK untuk pembangunan sebelum berkembangnya internet atau TIK-UP 0,0 yang memberikan peranan pada peningkatan efisiensi dan pelayanan karena organisasi pemerintah dan lembaga swasta didukung oleh penggunaan *personal computer* dan tersedianya aplikasi data basis. Ketika internet berkembang tahun 1990-an maka teknologi komunikasi telah mendukung komunikasi data jarak jauh, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pembangunan *telecenter*. Fase ini disebut dengan fase TIK-UP 1,0. Fokus mendayagunaan TIK ialah pada pembuatan konten dan layanan interaktif dengan pengguna.

Setelah teknologi mobil berkembang, maka berkembang pula layanan-layanan baru mengikuti dinamika mobilitas aktivitas manusia dan berbagai inovasi yang memberikan pengaruh pada peningkatan mobiltas baik individu maupun organisasi.

Tabel : 2
Tahapan Model Pembangunan dan implikasinya pada Model Komunikasi dan TIK untuk Pembangunan²

Tahapan Pembangunan					
1950s	1960s	1970s	1980s	1990s	2000s
Fase Modernisasi Pertumbuhan sebagai pengembangan model pembangunan ganda, pendapatan dinilai sebagai model kekuatan dibalik pertumbuhan.					
	Pendekatan transformasi Pemindahan teknologi terbesar dari Negara maju dengan mekanisme besar				
		Distribusi ulang dengan pertumbuhan Fokus kepada kebutuhan dasar dan intervensi Negara sangat tinggi (kebijakan pertanian dan kredit			

² Merupakan adaptasi dari tulisan Duncombe yang mengadaptasi pada Ellis, F. & Biggs, S. (2001) *Evolving themes in rural development 1950s-2000s*, *Development Policy Review*, 19(4):437-448 [and] Heeks (2009). Adaptasi penulis ialah dengan menambah tahapan model komunikasi pembangunan, yang aslinya hanya focus pada implikasi pada TIK untuk pembangunan dan tambahan Fase konvergensi yang menyatukan model komunikasi untuk pembangunan dan TIK untuk pembangunan.

Tahapan Pembangunan					
1950s	1960s	1970s	1980s	1990s	2000s
			Penyesuaian secara structural Diawali denan ditariknya peranan negara, dan fokus pada pasar untuk mendapatkan harga yang tepat Fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan dalam prosesnya melibatkan LSM yang lebih besar		
				Pembangunan manusia Multi dimensi. Kridit mikro, gender, lingkungan, kesejahteraan. Fokus terbesar paa metode partisipasai.	
Pase Komunikasi dan Pembangunan					
Komunikasi Pembangunan			Komunikasi untuk pembangunan		
Sumber inovasi dari atas yang didorong oleh pemerintah Keikutsertaan masyarakat melalui proses mobilisasi dan melalui coersif			Sumber inovasi tidak saja dari pemerintah tetapi datang dari lingkungan masyarakat, keterlibatan LSM dalam proses pembangunan, masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemgawasan pembangunan.		
Difusi Informasi					
	Pemasaran social				
			Komunikasi Partisipatif		
Pase TIK dan Pembangunan					
TIK-UP 0.0		TIK-UP 1.0		TIK-UP 2.0	
PCs/Databases Menekankan pengolahan data untuk mencapai efisiensi organisasi terutama dalam pemerintahan tetapi juga di sektor swasta sebagai bagian dari pengendali modernisasi		Telecentres Menekankan pada pembuatan konten & interaksi dengan pengguna		Mobile? Menekankan pada layanan baru dan inovasi	
Pase Komunikasi Pembangunan model konvergensi					
			<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan saluran multi platform • Sumber Inovasi dan kreatifitas lintas individu, keluarga/kelompok, negara. • Ketergantungan lintas nasional, regional dan global. • Proses kolaboratif 		

C. Kasus Implementasi

1. Model Linier

Pembangunan sebagai upaya melakukan perubahan di suatu Negara sudah dilakukan sejak mulai pemerintahan Indonesia berdiri dan malah sudah dimulai dilakukan oleh para tokoh-tokoh kebangsaan ketika berusaha menumbuhkan kesadaran berbangsa, sebelum tahun 1945. Dalam buku Sejarah Departemen Penerangan (1982/1983) disebutkan pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan 1945, terdapat upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran nasional, untuk melawan pemerintahan Belanda, dan pentingnya membangun bangsa.

Pada era 1945 sampai 1950, upaya yang dilakukan lebih fokus pada menegakan Negara Nasional. Artinya pada periode tersebut lebih menonjol pada upaya agar Negara Nasional itu berdiri dimana pada waktu itu masih ada tantangan dan ancaman terhadap berdirinya Negara Indonesia setelah diproklamlirkan tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai tahun 1959, pemerintahan memfokuskan pada upaya untuk menegakan kesatuan nasional. Permasalahan bangsa ialah bagaimana memperkuat kesatuan bangsa. Masalah ideologi, merupakan permasalahan bangsa pada tahap berikutnya antara tahun 1959 – 1965. Pada waktu itu Negara memberikan perhatian pada upaya untuk membela ideologi Negara yaitu Panca Sila.

Perhatian pada upaya untuk mensukseskan pembangunan baru mulai tahun 1966, walaupun upaya untuk merencanakan pembangunan itu sendiri telah dimulai pada tahun 1960, setelah pemerintah presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Pembanguan Nasional Berencana Nasional dengan jangka waktu selama 8 tahun. Mulai tahun 1966, iklim pemerintahan berubah setelah pemberontakan PKI melalui G30S nya berhasil digagalkan, pemerintah mulai menata kehidupan berbangsa yang tidak lagi focus pada politik, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya-upaya pemerintah pada periode sebelum 1996, masih dalam kerangka menegakan negara kesatuan dan penanaman ideologi, maka cara-caranya pun lebih pada menggunakan indoktrinasi. Kepada masyarakat ditanamkan konsep-konsep dan pemikiran serta kebijakan dan program yang searah dan melalui paksaan walaupun bersifat psikologis, misalnya bagaimana pemerintah menanamkan pancasila sebagai ideologi tunggal, melalui penataran P4. Upaya-upaya mencapai tujuan pembangunan, pada awal program pada tiap waktu periode Repelita I sampai V, pembanguan masih didasarkan bahwa anggapan masyarakat belum mampu dan memiliki gagasan untuk membangun dirinya, oleh karena itu berbagai model difusi inovasi dilakukan.

Di bidang pertanian, pemerintah memiliki berbagai program peningkatan produksi pertanian, misalnya Panca Usaha Pertanian (PUP) yang dilaksanakan pada tahun 1963/1964. Program tersebut dikenal dengan nama Demonstrasi Massal Swasembada Bahan Makanan atau disingkat Denmas SSBM yang lebih lanjut dikenal dengan program Bimas atau Bimbingan Massal. Program ini diikuti dengan program Insus, atau Intensifikasi khusus yang dilaksanakan pada tahun 1986/1987.

Menurut Mugniesyah (2006) sebagaimana dikutip oleh Sadodo (2009), proses komunikasi yang digunakan ialah model difusi linier sebagaimana dikemukakan oleh David K Berlo, yaitu SMCR, yaitu S (sumber), M (Media dan metode), C (channel atau saluran) dan R (receiver). Dalam proses ini yang menjadi sumber ialah pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh para peneliti pertanian yang mengembangkan gagasan atau inovasi yang tercakup dalam program pertanian di atas dan melaksanakan proses difusi tersebut. *Channel* atau saluran komunikasi ialah para petugas penyuluh lapangan (PPL), dan para petani sebagai *receiver* atau pihak yang akan menerima berbagai gagasan baru dalam mengembangkan pertanian di atas.

Model ini merupakan model komunikasi satu arah dan *top down*, hirarkis. Teknologi pertanian dalam hal ini Bimas di transfer dari pihak yang memiliki teknologi kepada para petani dengan asumsi petani tersebut pasti membutuhkan teknologi tersebut. Model ini dianggap gagal dalam menyebarkan difusi inovasi karena beberapa hal. Pertama, inovasi yang ditawarkan tidak menyentuh kepada penerima langsung, karena yang memperoleh manfaat hanya lapisan atas masyarakat yang jumlahnya sepertiga jumlah petani. Dalam kaitan ini biasanya yang memiliki dan mengolah lahan tersebut berasal dari keluarga penyuluh, para peneliti yang sebenarnya merupakan keluarga petani. Model ini juga tanpaknya tidak mempercayai para petani, pebisnis

dan para professional mengetahui permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah pertanian yang dihadapi. Pendekatan *top down* dalam model ini juga dinilai kurang luwes, karena bersifat instruksional sehingga tampak statis dan mekanis. (Sadono, 2009).

Model lain yang pernah dikembangkan adalah model Hierarkhis Dua arah, Model komunikasi Forum, Model komunikasi Jejaring, dan model siklus pengalaman bejajar. Kedua model pertama merupakan model yang berangkat dari komunikasi konvergen yaitu sebuah model yang menggambarkan terjadinya komunikasi timbal balik antar peneliti atau penyuluh yang mewakili pemerintah dan masyarakat. Model hierarkhi dua arah dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan kunjungan (atau LAKU). Pendekatan ini berusaha memadukan program pelatihan dan kunjungan yang terjadwal kepada kelompok tani, dan dalam kunjungan inilah terjadi interaksi.

Model media forum, merupakan model komunikasi dua langkah, yaitu dari media massa kepada pemimpin pendapat dan kemudian disampaikan kepada petani atau kelompok tani melalui kelompok pendengar dimana mereka melakukan interaksi dan diskusi untuk membahas informasi yang diterima *opinion leader*. Oleh Departemen Penerangan kemudian dikembangkan dengan memeluas jaringan kerjasamanya antara lain dengan mendorong terbentuknya Kelompokcair, yaitu kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa TV. Dengan demikian akses terhadap informasi lebih luas.

Kedua model tadi sebenarnya masih bersifat linier, karena petani tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang produk yang akan digunakan dan bisa diterima oleh masyarakatnya. Model komunikasi jejaring, dikembangkan tahun 1984 setelah prestasi produksi pertanian mencukupi kebutuhan dalam negeri atau swasembada. Dalam kondisi ini ada kebutuhan petani untuk mengembangkan komoditas lain, sehingga petani mengembangkan pencarian informasinya ke sumber-sumber lain, yang tidak terbatas mencari teknologi di bidang pertanian, sehingga komunikasi pun dilakukan dengan mengembangkan jejaring yang lebih luas.

Model linier pada era reformasi masih banyak digunakan oleh berbagai sektor yang dikemas dalam program deseminasi berbagai kebijakan melalui forum forum ceramah, pemasangan iklan layanan masyarakat dan media luar ruang. Sering program program tersebut hilang timbul yang tidak terprogram dalam sebuah strategi perencanaan komunikasi yang berkesinambungan dan terukur.

2. Model Pemasaran Sosial

Pemasaran sosial merupakan strategi melakukan perubahan masyarakat dengan menggunakan teknik pemasaran. Sebagaimana dalam strategi pemasaran produk-produk komersial yang akan diubah adalah perilaku individu agar tertarik membeli produk yang ditawarkan, pemasaran sosial pun ditujukan kepada individu. Elemen-elemen pemasaran paling sedikit ialah *product, place, promotion dan price* (harga). Elemen inilah yang harus dibaurkan agar menjadi kesatuan strategi memenangkan pesaingan.

Pada era presiden Soeharto, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam mengkapanyekan program keluarga berencana bekejasama dengan perusahaan periklanan dan meluncurkan strategi pemasaran sosial untuk mewujudkan program keluarga berencana. Program ini digagas setelah suksesnya program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dimana setiap petugas lapangan KB dan pelayanan puskesmas melakukan gerakan penyadaran kepada masyarakat untuk menjadi akseptor KB melalui pendekatan kelompok. Sukses ini membawa tantangan baru, dimana Puskesmas dan Rumahsakit tempat pelayanan KB, menjadi penuh atrian dan membludak. Hal inilah, menimbulkan pemikiran bagaimana agar pelayanan KB bisa dialakukan secara mandiri, dalam arti klinik-klinik kesehatan bisa membuka layanan sendiri dengan biaya sendiri yang tentunya didukung oleh konsumennya. Maka dimulailah penelitian untuk mengembangkan Keluarga Berencana Mandiri. Program KB Mandiri dicetuskan tahun 1986, setelah ada kesediaan dokter, bidan, apoteker untuk berpartisipasi memberikan pelayanan keluarga Berencana (Suyono, 2007).

Dengan dukungan lembaga periklanan, kemudian dengan strategi pemasaran sosial membuat logo lingkaran biru, sebagai lambang pelayanan program KB Mandiri, sebagai satu tahapan pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

(NKKBS). Indikator KB Mandiri adalah apabila masyarakat dan sektor swasta dan organisasi profesi mampu memberikan layanan jasa yang berdiri sendiri.

Peluncurannya dilakukan pada tahun 1997, dengan meluncurkan logo KB LIBI atau KB lingkaran biru. Lebih lanjut untuk mengatasi hambatan dalam menawarkan kontrasepsi lain yang dihasilkan produsen yang jenis kontrasepsinya tidak termasuk dalam paket LIBI, atas persetujuan presiden kemudian diresmikan penambahan alat kontrasepsi yang dijual dengan paket mandiri, yang kemudian disebut program KB Lingkaran Emas. Pelayanan KB Mandiri LIBI dan LIMAS, menumbuhkan rasa bangga kepada peserta KB untuk melaksanakan program KB baik dalam memperoleh alat kontrasepsi maupun pelayanan kesehatan dengan biaya sendiri (Suyono, 2007).

Penggunaan strategi pemasaran sosial diperlukan kejelasan produk sosial yang ditawarkan, dalam hal ini program KB Mandiri, telah memberikan positioning yang kuat, sehingga konsumen berbangga dengan KB Mandiri. Dalam konteks ini produk sosial yang ditawarkan tidak saja keyakinan tentang manfaat program KB dan sikap mendukung untuk melaksanakan KB, tetapi juga diikuti atau disertai keharusan menggunakan produk yang *tangible* (alat kontrasepsi) dan juga tindakan berupa pelayanan. Keunggulan mengelola bauran itu yang menjadi kunci keberhasilan pemasaran sosial keluarga berencana (Suyono, 2007)

3. Komunikasi pembangunan partisipatif

Model komunikasi pembangunan partisipatif, merupakan model yang dibangun dengan pendekatan dari bawah dan fokusnya kepada pembangunan mikro. Dalam pembangunan pertanian, sebagaimana dikemukakan oleh Sadomo (2009) setelah para petani memperoleh banyak penyuluhan dan program-program lainnya seperti pelatihan-pelatihan, petani kemudian dianggap mampu melakukan komunikasi ke berbagai sumber dan tidak lagi dianggap sebagai pihak yang tidak paham dan mampu melakukan inovasi. Dalam kondisi ini paradigma difusi inovasi tidak cocok lagi, dan kemudian diterapkan model *Experimental Learning Cycle (ELC)*.

Dengan model ini terjadi komunikasi aktif antara petani dengan penyuluh, untuk memahami lingkungan, dan menemukan inovasi yang berasal dari lingkungannya yang kemudian dikembangkan oleh mereka. Model ini merujuk pada model yang dikemukakan Mc Clure dari Roadhes (1984) yang merupakan model yang kompleks dengan menekankan pada aliran informasi dari petani ke petani dan mengarahkan pada kesempatan yang ditawarkan perbaikan interaksi antara peneliti dengan petani (Mugniesyah dalam Sadono, 2009).

Model ini pernah diterapkan dalam model penyuluhan sekolah lapangan (SL), dengan berbagai bidang pertanian seperti Sekolah Lapangan Hama Terpadu (SL-PHT, Sekolah Lapangan Usaha Tani Berbasis Agribisnis. Proses pembangunan dalam model ini, diawali dengan upaya menggali pengalaman di lingkungannya, kemudian mempertukarkan atau mendiskusikan, kemudian menarik kesimpulan dan menetakannya. Menurut Sadono (2009) melalui program Bimas selama tiga dekade, melahirkan petani yang dalam pemikirannya tertanam bahwa semua hewan yang ada di sawah adalah hama tanaman padi (*pesticide minded*), yang harus dibasmi secara *intensif dan terjadwal*. Setelah mengikuti model penyuluhan yang mengedepankan keterlibatan petani atau pola partisipatif, yaitu SL-PHT, ternyata diketahui sebagian hewan yang ada di sawah adalah merupakan hewan yang membantu petani dalam mengendalikan hama sawahnya.

Komunikasi pembangunan partisipatif, dapat dilihat dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), yang dimulai tahun 2007. Program ini digulirkan dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Program ini dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perkotaan. Program ini tersusuk berkembang ke sektor-sektor lain sehingga diharapkan menjadi basis program setiap sektor. Tujuan khusus program ini antara lain ialah untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat, terpencil dan kelompok masyarakat yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Proses pemberdayaan mulai dari sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat untuk menjelaskan program dan membuat kesepakatan penerimaan program, setelah itu kelompok mulai mengenali kemiskinan yang terjadi dan menemukan factor apa yang menjadi penyebab kemiskinan dan menemukan cara-cara yang bisa menjadi pemicu pengentasan kemiskinan. Setelah itu melakukan pemetaan swadaya masyarakat untuk menemukan sumberdaya yang bisa disumbangkan dalam melaksanakan program pembangunan (disamping dana yang disiapkan dari program). Tahap berikutnya itu dilakukan pengorganisasian, dan penyusunan rencana sampai pelaksanaannya. Keseluruhan prosesnya dilakukan oleh masyarakat, dan terakhir tahap pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan.

Untuk membimbing pelaksanaan program di tingkat kecamatan/desa dan komunitas, pemerintah menyediakan fasilitator, termasuk di dalamnya bagaimana menciptakan komunikasi diantara stakeholder program. Tim komunikasi berusaha mengembangkan media komunikasi diantara mereka dan melatih mereka untuk mengelola media komunikasi untuk lingkungan mereka dan menjalin komunikasi dengan pembina program.

Sampai tahun 2012 kecamatan yang sudah melaksanakan program PNPM Mandiri sebanyak 6.636, dengan kegiatan masyarakat berupa membangun jalan, jembatan, saluran air, drainase, sarana untuk mandi, mencuci, dan buang air atau Cakus, yang disingkat MCK, perbaikan bangunan sekolah, pemberian bea siswa, rumah layak huni dan pembuangan sampah, simpan pinjam, usaha-usaha kecil lainnya.

4. TIK untuk Pembangunan

Di Indonesia pendayagunaan TIK untuk pembangunan perkembangannya sesuai dengan perkembangan infrastruktur dan tingkat literasi masyarakatnya. Penggunaan *personal computer* pada awal pertumbuhan penggunaan TIK hanya ada di kota-kota besar yang memiliki literasi yang relative baik. Pembelian dan distribusi peralatan komputer sering tidak disiapkan dengan aplikasi yang sesuai kebutuhan dan kesiapan SDMnya, namun secara perlahan-lahan penggunaan komputer sebagai alat kerja kantor sudah tidak asing lagi, hanya penggunaan data base untuk kepentingan data yang terintegrasi dewasa ini masih menjadi permasalahan.

Demikian juga penggunaan komputer dan jaringannya untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini belum sepenuhnya merata digunakan di lembaga pemerintahan. Dengan berkembangnya internet sebagai *platform* jaringan, penggunaan TIK untuk pembangunan, semakin membuka peluang inisiatif lembaga pemerintah dan dunia usaha untuk memanfaatkan internet untuk kepentingan mengakses informasi, mengunggah informasi, mempromosikan dan mengkomunikasikan data. Lembaga lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat memanfaatkan keunggulan ini untuk melakukan berbagai upaya meningkatkan kapasitasnya. Setelah teknologi mobil berkembang, maka peranan TIK semakin luas dan dinamis karena produsen dan pengguna informasi tidak lagi terpaku pada tempat tetapi lebih lugas dan dinamis.

Penggunaan TIK untuk pembangunan merupakan kelanjutan model komunikasi untuk pembangunan, yang bercirikan pembangunan mikro dan bertolak dari kehidupan masyarakat. Ketika internet mulai berkembang, Kementerian Komunikasi Informasi mengembangkan *Community Access Point* (CAP) dan *Mobil Community Access Point* (M-CAP), sebagai suatu bentuk gerakan masyarakat cerdas yang bertujuan peningkatan pengetahuan, kecerdasan, dan pengentasan kemiskinan sekaligus upaya menjembatani kesenjangan digital dengan memanfaatkan telematika (SK Menteri Koinfo No.130/Kep/M.Koinfo/11/2008). Dalam program CAP disediakan fasilitas komunikasi dan akses pada internet, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dengan berbagai tujuan, mengakses sumber informasi sesuai dengan kebutuhan mereka, berkomunikasi dan juga melakukan transaksi *on line*.

Kegiatan sejenis juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga bisnis lainnya, seperti Menristek mengembangkan warung informasi dan teknologi. Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) sebuah organisasi yang mewadahi para pakar dan praktisi telekomunikasi mengembangkan Balai Informasi Masyarakat. Selain CAP yang memberikan layanan stasioner atau pasif menunggu para pengguna, Kementerian Koinfo juga mengembangkan *Mobil Community Acces point*, yang tujuannya sama dengan CAP namun operasionalnya bisa keliling atau mobil mengunjungi tempat-tempat atau komunitas yang

diperkirakan membutuhkan layanan seperti lingkungan sekolah dan pada event-event keramaian tertentu. Jumlah CAP sampai 2011 mencapai 93 CAP sedangkan MCAP 5 unit. Program-program lain yang sejenis, ialah Warmasif, Pusat Komunitas Kreatif, Inkubator inovasi telematika. Warmasif singkatan dari Warung Masyarakat Informasi, dilihat dari namanya “warung” memiliki fungsi tempat jual beli, artinya program ini dibuat untuk memajukan unit usaha. Lokasi Warmasif di tempatkan di kantor pos, yang biasanya berada di area bisnis dan pelayanan pada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memanfaatkan warung ini untuk meningkatkan unit usaha yang ada dalam masyarakat.

Pelayanan yang diberikan ialah pelayanan untuk pencarian produk dan promosi produk, serta aplikasi lainnya yang menunjang. Demikian juga Pusat Komunitas Kreatif focus pada upaya pemberdayaan Unit Usaha Mikro Kelompok Menengah mencoba menjalin kelompok UMKM dan LSM untuk menghimpun dan menyalurkan kreatifitas mereka dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi agar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sedangkan Inkubator Inovasi teknologi memfokuskan pada tujuan menumbuh kembangkan kewirausahaan teknologi atau *technopreneurship* bidang TIK. Inkubator bisnis ini memberikan fasilitasi berupa pendampingan management dan teknis, fasilitas peralatan untuk digunakan secara bersama-sama dalam memperoleh akses pada pasar, modal dan pelatihan pelatihan.

Program-program tadi masih terbatas jangkauannya, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk diperluas jangkauannya sehingga selanjutnya secara masal bisa dibuat program Pusat Pelayanan Internet Kecamatan (PLIK) dan MPLIK Mobil. Pelayanan Internet Kecamatan merupakan penyediaan fasilitas layanan yang diselenggarakan sebagai bentuk layanan kepada wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan. Program layanan tersebut merupakan program *Universal Service Obligation (USO)*, yang menyediakan layanan akses kepada masyarakat. Perangkat yang diberikan ialah berupa komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet, yang sampai tahun 2011, telah tersedia 5.330 PLIK dan 342 MPLIK. Melalui penyediaan fasilitas ini masyarakat tidak terasing lagi, karena bisa berhubungan dengan pihak luar dengan mudah baik dalam komunikasi pribadi atau komunikasi bisnis dan lainnya. Jumlah yang cukup masif yang seharusnya akan memberikan efek pada peningkatan masyarakat .

Menurut hasil audit lembaga Audit Independen, dari keseluruhan program tersebut yang berjalan hanya 70 % (Tifatul Sembiring, Tempo Co). Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian di lingkungan Badan Litbang SDM Kominfo³ ditemukan informasi tentang kegagalan program dukungan USO tersebut yang dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, yaitu managerial, teknis, SDM. Dari aspek managerial, para peneliti menemukan proses implementasi program ini tidak terkoordinasi secara fungsional seperti pelibatan pemerintah daerah dan aparat pada tingkat kecamatan dan desa. Mereka merasa tidak dilibatkan sehingga merasa tidak ikut bertanggungjawab. Aspek teknis, umumnya masalah kapasitas akses yang tidak memadai atau “lemot”. Pelanggan semakin menjauh setelah adanya kemudahan pelayanan di tempat lain, seperti warnet dan berkembangnya *smart phone* yang menyediakan fitur layanan internet.

Dari aspek SDM, terungkap bahwa SDM pengelola PLIK dan MPLIK tanpanya kurang dipersiapkan terutama untuk tingkat pemanfaatan konten yang berguna bagi pembangunan masyarakat. Pendampingan juga tidak dilakukan. Secara keseluruhan, setelah dua tahun pemanfaatan program USO baru terbatas pada memberikan manfaat untuk komunikasi dan interaksi, dan belum sampai pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Program ini pada awalnya tumbuh di daerah dan implementasinya tidak ada hambatan bahkan memberikan atusiasme dan harapan kepada masyarakat untuk mendayagunakan TIK. Program ini diharapkan juga akan menjadi stimulan dalam meningkatkan kapasitas individu, kelompok dan pemerintah daerah untuk mendayagunakan TIK untuk bisa dijadikan sumber pengetahuan dan pembelajaran serta inovasi. Namun demikian harapan itu menjadi pupus, setelah tidak ada kejelasan program kesinambungannya.

³ Merupakan inti temuan yang berkaitan penyebab kegagalan program USO dari hasil penelitian evaluatif terhadap implementasi program USO, oleh Balai-dan Balil besar di lingkungan Badan Litbang SDM Kominfo, dan Puslitbang APTIKA tahun 2012. Di lokasi antara lain Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat .

Sebagai kasus dapat dikemukakan di sebuah PLIK di Kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, Banten kini tidak lagi sanggup melanggan jaringan, iuran minimum sesuai standar yang dibebankan kepada pemakai tidak lagi bisa menutupi, karena pengguna sepi. Semakin jarang pengunjung ke PLIK karena berkembangnya warnet lain yang bisa memberikan layanan yang lebih cepat. Ketika awal PLIK di buka pengunjung rame, dan hal ini pula yang mendorong inisiasi provider menyediakana layanan dan kemudahan anggota masyarakat bisa membuka palayanan Warnet. Bisa dikatakan satu sisi merupakan keberhasilan PLIK memberikan efek mendorong unit usaha sejenis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain ternyata secara perlahan mematikan PLIK karena pemeliharaan dan ketidak jelasan exit programnya (wawancara dengan pengelola PIIK Curug, Kabupaten Tangerang, Banten).

Hal yang sama terjadi pada MPLIK, kecamatan Karawaci, kota Tangerang. MPLIK pada awalnya disambut warga dengan penuh antusias, mobil dibawa keliling ke sekolah sekolah dan tempat keramaian, dan bahkan di kampung tempat mobil tersebut mengoperasikan mobilnya selalu dipenuhi oleh warganya untuk mencoba menggunakan internet dari MPLIK. Mereka mengakses sumber ilmu pengetahuan untuk kepentingan sekolah, lowongan kerja untuk yang cari kerja, informasi kesehatan untuk mencari tahu sebab penyakit dan obatnya.

Namun apa daya kondisi ini hanya bertahan sampai enam bulan, setelah itu operasionalnya hanya tergantung kebaikan hati pengelola mobil, untuk membiayai bensin dan solar. Kini sudah empat bulan mobil nongkrong di halaman rumahnya, dan untuk pengamanan peralatan komputernya diamankan di rumah. Pengelola tidak berdaya karena aksinya “lemot” sehingga pengunjung akhirnya “lari” ke wahana lain, smart phone menjadi tempat mereka mengakses internet. Dengan demikian mengharapkan membiayai mobil dengan membayar adalah tidak mungkin. Pengelolanya berpendapat, jika akan dijadikan pelayanan public maka para pengguna tidak membayar dan ada subsidi yang menunjang operasional mobil pelayanan internet ini (wawancara dengan pengelola MPLIK di Tangerang).

D. Implikasi pada konsep dan Model Pembangunan

Proses perubahan dalam masyarakat akan terus bergulir sebagai sebuah tuntutan individu dan masyarakat, karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan pemenuhan konsepsi kebahagiaan masing-masing baik secara pribadi maupun kelompok dan masyarakat. Pemerintah sebagai bagian dari system kehidupan bernegara memiliki tanggungjawab untuk mengantar masyarakatnya menjadi hidup layak dan sejahtera. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, sangat dipengaruhi cara pandang kepada masyarakatnya.

Jika dewasa ini proses perubahan dianggap sebagai proses pembangunan, maka makna perubahan apakah masih sama dengan makna pada era pemerintahan orde baru sebagai pembangunan dalam imaji negatif, masih harus di uji. Walaupun upaya pembangunan sebagai upaya penggusuran ada yang sudah mulai diberikan alternative untuk mengatasi, sehingga terkesan bukan menggusur. Dalam proses pertanian dan keluarga berencana sudah ada yang mencoba menggunakan pola-pola komunikasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dan menggunakan model pemasaran sosial yang prosesnya dimulai dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat. Namun demikian pada akhirnya konsep perubahan dan reformasi citranya dan manfaatnya akan dilihat dari *outcome* proses itu sendiri.

Dalam konteks penggunaan TIK untuk pembangunan sudah banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah namun masih bersifat *top down* dengan tanpa melibatkan masyarakat dan menyiapkan program kelanjutannya setelah pemberian bantuan infrastruktur selesai dilakukan. Demikian juga pandangan terhadap TIK masih dominan dari sisi infrastruktur sebagai penentu, sehingga fokus pembangunan lebih dominan pada penyediaan infrastruktur. Seharusnya jika penyediaan infrastruktur sebagai bagian dari pendekatan TIK untuk pembangunan maka, program yang dibangun lebih komprehensif.

Program tersebut harus memikirkan kesinambungan implementasinya yang bisa menjamin keberhasilan mencapai sasaran pembangunan yaitu perubahan masyarakat ke arah lebih baik. Sebagaimana pada model komunikasi penunjang pembangunan yang menggunakan pola partisipatif sebagai kerangka kerja, maka demikian juga mendayagunakan TIK untuk pembangunan sebaiknya menggunakan model komunikasi partisipatif.

Berbagai kesepakatan global mengenai pembangunan seperti MDGs dan Masyarakat Informasi, memiliki dua dimensi yaitu negatif dan positif. Berbagai kesepakatan tersebut digerakan oleh negara-negara maju, yang sesungguhnya membutuhkan pasar produk mereka. Ketika pasar di negaranya sudah mulai jenuh dan perlu mengembangkan sayapnya ke negara-negara lain, maka diperlukan upaya percepatan pembangunan di negara-negara lain. Atas dasar itulah kesepakatan dibuat, agar negara-negara lain bisa meningkatkan kualitas pembangunannya. Apabila negara-negara lain telah mencapai target target kesepakatan global untuk membuka pasar atau memiliki jaringan untuk membuka pasar produk mereka, maka negara-negara tadi bisa secara bebas memasarkan produknya. Kesepakatan yang dibuat tidak saja dalam kemampuan transaksi tetapi juga mencakup aspek personil, dimana kita menyetujui kesepakatan pergerakan tenaga kerja antar negara dengan standar-tandar yang disepakati yang cenderung menerapkan standar mereka. Apabila telah berlaku maka pasar tenaga kerja ke negara berkembang semakin terbuka, sehingga kompetensi dalam negeri dikalahkan dengan kompetensi mereka. Oleh karena itu model pembangunan global akan cenderung digunakan sebagai wahana agar negara-negara berkembang terus tergantung pada negara maju, yang tentunya efeknya negatif bagi pembangunan kemandirian bangsa. Namun demikian aspek positifnya, keikutsertaan dalam kesepakatan global paling tidak dilihatnya sebagai peluang dalam meningkatkan kapasitas diri sehingga akan lebih terpicu untuk meningkatkan kinerja pembangunan masyarakat, sebagai upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan bukan sebaliknya menciptakan ketergantungan kepada negara maju yang memperdaya negara sendiri.

E. Komunikasi Pembangunan Model Konvergensi

Ada dua tekanan utama yang menyebabkan perlunya perubahan model pembangunan yang selama ini berlangsung, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan globalisasi. Dalam transformasi sosial teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah paradigma (Castells, 2010) yang mengandung lima ciri. Pertama informasi merupakan *raw material* yang akan dibawa oleh teknologi yang akan dipengaruhi oleh karakteristik teknologi itu sendiri. Kedua teknologi memberikan efek yang mendalam terhadap subjek yang dihadapi karena informasi menjadi bagian integral dari aktifitas manusia. Ketiga proses relasi antar orang melalui teknologi informasi baru menjadi sebuah jejaring. Keempat, adanya fleksibilitas baik dalam aspek proses maupun organisasi dan Institusi. Kelima ialah adanya konvergensi dari teknologi yang spesifik dalam sistem yang terintegrasi. Dengan demikian pembangunan di Indonesia kini sudah memasuki lingkup paradigma teknologi dan informasi, yang melihat hubungan antar manusia sebagai jejaring dalam sebuah sistem yang dibangun oleh teknologi informasi, walaupun belum merata di seluruh lapisan sosial ekonomi masyarakat.

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan persaingan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu menuntut kesiapan manusia Indonesia untuk berkompetisi dengan tanpa meninggalkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Artinya manusia Indonesia harus memiliki daya saing dan kuat berpijak pada kearifan lokal. Implikasinya kepada komunikasi pembangunan ialah pada tataran konten perlunya memproduksi dan proses *sharing* informasi yang menjadi sumberdaya inovatif dan kreatif.

Dengan kedua tekanan tadi, maka kunci utama dalam proses pembangunan adalah menciptakan inovasi dan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan daya saing dengan negara-negara lain. Sumber inovasi dan kreatifitas tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi bisa dari masyarakat baik tingkatan individu, keluarga, kelompok atau negara. Prosesnya adalah saling berbagai atau *sharing* yang bisa saja dalam arus dari pemerintah ke masyarakat, atau antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat. *Sharing* juga terjadi antara tingkatan individu, kelompok dan negara.

Proses *sharing* disalurkan melalui media multi *platform*, sebagai sebuah konvergensi⁴ dalam pengertian Jenkins (2006), yaitu konten yang disalurkan melalui banyak platform

⁴ Konsep convergence digunakan sebagai sebutan model komunikasi oleh Rogers dan Kincaid (1981), untuk proses komunikasi antara komunikator dan komunikan yang tarsus menerus samapai terjadi kesamaan pemahaman (mutual understanding), dalam tulisan ini tidak dalam arti tersebut tetapi focus dengan yang dimaksud Jenkins (2006). Proses kesamaan pemahaman sudah menjadi bagian dari proses *sharing* dan komunikasi yang mendalam (pervasiveness) dalam komunikasi berbasis TIK.

sekaligus, bisa media radio, televisi, film, surat kabar sebagai media konvensional dan media baru sekaligus. Media baru ialah media berbasis jaringan internet seperti portal atau web site, berbagai jenis media sosial, seperti facebook, twitter, youtube. Posisi pemerintah dalam komunikasi pembangunan model ini menjadi fasilitator sumber konten informatif, inovatif dan kreatif. Dengan mengembangkan sumber informasi informasi tersebut diharapkan akan tumbuh pengikut aktif (*active follower*) yang bisa berbagai (*sharing*) dengan individu atau kelompok lainnya. Dengan terjadinya proses sharing informasi, inovasi, kreatifitas maka diharapkan tidak saja tercipta partisipasi terhadap suatu program tetapi terjadi proses kolaboratif antar *stakeholder*.

Untuk mewujudkan model pembangunan tersebut dalam kondisi masyarakat Indonesia yang literasi TIKnya belum merata, diperlukan upaya peningkatan literasi yang massif. Hal ini juga untuk mengimbangi upaya peningkatan infrastruktur yang selama ini sudah mulai meningkat yaitu dengan pembangunan fasilitas internet di kecamatan baik bentuk layanan di tempat maupun mobil.

PENUTUP

Model partisipatif dalam komunikasi pembangunan di Indonesia tampaknya masih belum menjadi strategi. Walau sudah ada program yang menggunakan model tersebut seperti pada program PNPM Mandiri, model linier melalui program diseminasi informasi dan difusi inovasi masih dominan digunakan. Program TIK untuk pembangunan pelaksanaannya lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dan belum disertai pemberdayaan yang menggunakan model partisipatif dan berkesinambungan. Efeknya belum sepenuhnya menunjukkan tingkatan manfaat atau *outcome* yaitu perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian kosa kata perubahan dan reformasi maknanya masih menunggu bukti-bukti yang bisa merujuk adanya perubahan, jika tidak mencapai sasaran maka akan kehilangan maknanya kembali.

Model komunikasi untuk pembangunan merupakan model komunikasi mikro dengan pendekatan komunitas dan menggunakan strategi komunikasi partisipatif, kiranya perlu diintegrasikan dengan pembangunan dengan memberdayakan TIK dalam model TIK untuk pembangunan. Model integrasi tersebut adalah model komunikasi pembangunan konvergensi yang berbasis pada paradigma teknologi komunikasi dan informasi dengan menggunakan saluran komunikasi multi *platform*, yang kiranya terbuka untuk didiskusikan.

Daftar Pustaka

- Bossel, Hartmut. 1999. Indicator for Sustainable Development: Theory, Method, Application, A Report to Balaton Group, Canada: IISD
- Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta : Gramedia
- Development Communication, Singapore: The Asian Mass Communication Research and Information Center (AMIC)
- Duncombe, Richard, 2012. Development and Knowledge-base Society, ICT and Socio Economic Development Hand Out, University of Manchester.
- Hardiman, F Budi. 2009. Menuju Masyarakat Komunikatif. Jakarta: Kanisius.
- Jahi, Amri. 1988. Komunikai Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia ke Tiga: Suatu Pengantar, Jakarta: Gramedia
- Jayaweera, Neville. 1987. Rethinking development communication: a holistic view dalam Neville Jayaweera and Sarath Amunugama (ed), Rethinking
- Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture: Where old and New Media collide, New York: New York University Press
- Kotler, Philip. Eduardo L. Roberto. 1989. Social Marketing. Strategies for Changing Public Behavior, London : The Free Press.
- Moedjiono dk (ed) 2006. Dokumen Hasil Sidang Konfrensi Tingkat Dunia Mengenai Masyarakat Informasi, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika.

- Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan. 1982/1983. Sejarah Departemen Penerangan, Hasil penelitian diselenggarakan Universitas Gajah Mada. Jakarta : Departemen Penerangan.
- Reddi, Usha Rani Vyasulu. 2011. Primer 1 : Aan Introduction to ICT for Development, A learning Source on ICT for Development for Institutions of higher education, Inchion city: APCICT
- Rogers, Everett M & D. Larence Kincaid, 1981. Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research, New York: The Free Press
- Rogers, Everett M. 1976. The Passing of the Dominan Paradigm-Reflections on Diffussion Research, ini Wilbur Schramm and Daniel Lerner, Communication and Change. The last ten Year - and the next, Honolulu: An East -West Center Book.
- Rogers, Evertt M (ed). 1976. Komunikasi Pembangunan Perspektif Kritis, terjemahan LP3ES. Jakarta: LP3ES
- Sadono, Dwi,2009. Perkembangan Pola Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian di Indonesia, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Juli 2009 vol 07, No 2.ISSN 1693-3699.i
- Suyono, Haryono. 2009. Mengubah Loyang menjadi Emas, Depok : Harisma Bunda.
- Tufie, Thomas. 2009.Participatory Communication. Practical Guide. Washington: The World Bank

Dokumen

1. SK Menteri Koinfo No.130/Kep/M.Koinfo/11/2008), tentang Community Access Point
2. Document WSIS -03/GenevA/Doc/4-E, 12 Desember 2003. Declaration of Priciple : Building the Information Society: aglobal challenge in the new Millennium
3. Report of The Secretary-General, 2001, United Nation, 2003, Road map towards the Implementation of the United Nation Millenium Declaration, Fifty sixth session
4. Pedoman Umum Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Sekretariat Tim Pengendali PNPM Mandiri, Jakarta